

RENOP 2024-2025

PROGRAM DOKTOR ILMU POLITIK



www.s3ip.fisip.unas.ac.id

SK PENGESAHAN RENCANA OPERASIONAL



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Akreditasi :

Doktor Ilmu Politik (B) - Magister Ilmu Politik (A) - Magister Administrasi Publik (A) - Sarjana Ilmu Politik (A)
Sarjana Hubungan Internasional (B) - Sarjana Sosiologi (Unggul) - Sarjana Administrasi Publik (A)
Sarjana Ilmu Komunikasi (A)

Jl. Sawo Manila No. 81, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146,
Fax. 7802718-7802719 Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NASIONAL NOMOR : 23 A /D/VI/2023

Tentang PENETAPAN RENCANA OPERASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NASIONAL 2020 - 2025

- Menimbang :
- bahwa untuk memberi arah pengembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Tahun 2020-2025, perlu adanya Rencana Operasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional 2020-2025;
 - bahwa dalam rangka memberikan arah pengembangan Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, perlu adanya Rencana Operasional yang disusun berdasarkan Rencana Operasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional 2020-2025
 - bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a dan b perlu menerbitkan Peraturan Dekan tentang Rencana Operasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional 2020-2025
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Nasional Tahun 2021;
 - Surat Keputusan Rektor Nomor 181 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Menetapkan :
- MEMUTUSKAN :**
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NASIONAL TENTANG RENCANA OPERASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NASIONAL 2020-2025**



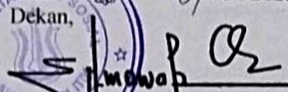
UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Akreditasi :

Doktor Ilmu Politik (B) - Magister Ilmu Politik (A) - Magister Administrasi Publik (A) - Sarjana Ilmu Politik (A)
Sarjana Hubungan Internasional (B) - Sarjana Sosiologi (Unggul) - Sarjana Administrasi Publik (A)
Sarjana Ilmu Komunikasi (A)


Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Telp.(021) 70737624, 7806700 Ext.146,
Fax. 7802718-7802719 Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

- Pertama : Rencana Operasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional 2020-2025 menjadi pedoman pelaksanaan pengembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional dalam kurun waktu 2020-2025
- Kedua : Rencana Operasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional 2020-2025 menjadi acuan dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran tahunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional
- Ketiga : Rencana Operasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional 2020-2025 menjadi acuan Prodi dalam menyusun Rencana Operasional Prodi.
- Keempat : Implementasi Rencana Operasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional 2020-2025 setiap tahun dituangkan dalam Kebijakan Program Kerja Tahunan Fakultas.
- Kelima : Setiap tahun dilakukan evaluasi capaian target kinerja tahunan sebagai dasar penyusunan kebijakan program kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional tahun berikutnya.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Dekan ini akan diatur lebih lanjut. Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 07 Juli 2023
Dekan,

Dr. Irma Ermawati Chotim, M.Si

- Tembusan Yth :
1. Para Ketua Program Studi FISIP
 2. Ketua UPM
 3. Kepala PKSP
 4. Kepala Tata Usaha
 5. Arsip

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. TB. Massa Djafar, M.Si.	Ketua Program Studi		20/08/24
2. Pemeriksaan	Verifikator BPM	Tim Verifikasi		
3. Persetujuan	Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si.	Ketua Senat Fakultas		
4. Penetapan	Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si.	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. Jeanne Noveline Tedja, M. Kesos	Ka. UPM Fakultas		

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Rencana Operasional Program Studi Doktor Ilmu Politik Tahun Akademik 2024-2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh civitas akademika dalam menjalankan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan tiga pilar utama dalam pengembangan ilmu politik di lingkungan universitas.

Rencana operasional ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari dosen, mahasiswa, serta pihak-pihak terkait lainnya, sehingga dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan semua pemangku kepentingan. Kami berharap bahwa dokumen ini akan menjadi acuan yang efektif dalam mencapai visi dan misi program studi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat sinergi antara akademisi, mahasiswa, dan masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan rencana ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami terbuka untuk menerima saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan program ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Operasional Program Studi Doktor Ilmu Politik Tahun Akademik 2024-2025 ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam mewujudkan program studi yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Jakarta, Agustus 2024

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik



Dr. TB. Massa Djafar, M.Si.

DAFTAR ISI

Contents

SK PENGESAHAN RENCANA OPERASIONAL	2
LEMBAR PENGESAHAN	4
Kata Pengantar	5
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang Penyusunan Rencana Operasional Program Studi Doktor Ilmu Politik Tahun 2020-2025	7
B. Landasan Penyusunan Rencana Operasional Program Studi Doktor Ilmu Politik Tahun 2020-2025	8
BAB II	11
PROFIL PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU POLITIK	11
BAB III	13
RENCANA PROGRAM TAHUNAN	13
BAB IV	17
PENUTUP	17
A. Rangkuman	17
B. Saran	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Rencana Operasional Program Studi Doktor Ilmu Politik Tahun 2020-2025

Penyusunan rencana operasional program studi Doktor Ilmu Politik didasarkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa program studi dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Latar belakang penyusunan rencana operasional ini meliputi beberapa aspek penting:

Pertama, kebutuhan Pengembangan Akademik dan Kurikulum: Program studi Doktor Ilmu Politik harus terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika politik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Rencana operasional diperlukan untuk memastikan kurikulum yang disusun relevan dengan kebutuhan zaman dan dapat memberikan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan oleh lulusan.

Kedua, Standar Akreditasi dan Kualitas Pendidikan: Rencana operasional disusun untuk memenuhi standar akreditasi nasional dan internasional, yang menuntut adanya proses pembelajaran yang berkualitas dan terukur. Hal ini penting untuk menjaga reputasi program studi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan yang diberikan.

Ketiga, kebutuhan Sumber Daya: Penyusunan rencana operasional juga mempertimbangkan kebutuhan sumber daya, baik itu sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), fasilitas pembelajaran (kelas, perpustakaan), maupun teknologi pendukung (sistem informasi akademik, platform e-learning). Rencana ini akan memastikan alokasi sumber daya yang optimal agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar.

Keempat, Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang: Program studi Doktor Ilmu Politik memiliki visi dan misi yang harus dicapai melalui tujuan dan sasaran strategis. Rencana operasional berfungsi sebagai panduan untuk mencapai tujuan tersebut dengan menetapkan kegiatan-kegiatan yang spesifik, terukur, dan realistis dalam jangka waktu tertentu.

Kelima, Respons Terhadap Perkembangan Kebijakan Pendidikan: Dinamika kebijakan pendidikan tinggi, baik dari pemerintah maupun badan akreditasi, mempengaruhi cara pengelolaan program studi. Rencana operasional ini disusun untuk memastikan bahwa program studi mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan yang terjadi, seperti kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Indonesia.

Keenam, Penguatan Kerjasama dan Jejaring: Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian, program studi perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan lain, lembaga riset, pemerintah, dan organisasi internasional. Rencana operasional akan membantu dalam merencanakan dan mengimplementasikan kerjasama strategis ini.

Ketujuh, Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan: Penyusunan rencana operasional juga bertujuan untuk menciptakan mekanisme evaluasi dan peningkatan

berkelanjutan dalam proses akademik. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspek dari program studi, mulai dari kurikulum hingga pelayanan mahasiswa, selalu mengalami perbaikan dan penyesuaian sesuai dengan feedback dan hasil evaluasi.

Latar belakang diatas menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar penyusunan rencana operasional Program Studi Doktor Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional. Dengan uraian diatas, diharapkan rencana operasional yang disusun dapat menjadi acuan dalam menjalankan program studi Doktor Ilmu Politik yang unggul dan mampu menjawab tantangan globalisasi serta kebutuhan masyarakat.

B. Landasan Penyusunan Rencana Operasional Program Studi Doktor Ilmu Politik Tahun 2020-2025

Kebijakan Rencana Strategis dan Rencana Operasional/Rencana Kerja Tahunan di Universitas Nasional Merujuk pada peraturan Rektor Nomor: 157.A/R/V/2023. Dimana beberapa ketentuan tentang penyusunan Renstra dan Renop/RKT mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Prosedur Penyusunan Renstra dan Renop/RKT ialah panduan bagi universitas/Fakultas/Unit Kerja dalam menyusun dan melaksanakan Renstra dan Renop/RKT di Universitas Nasional
2. Rencana Strategis adalah rencana jangka menengah (5 tahunan), yang merupakan penjabaran dalam pencapaian RIP.
3. Rencana Operasional/Rencana Kinerja Tahunan adalah rencana operasional jangka pendek (1 tahunan), yang merupakan penjabaran dalam pencapaian rencana strategis.
4. Tim penyusun Renstra dan Renop/RKT Universitas ditetapkan oleh Rektor. Wakil Rektor I mengusulkan Tim Penyusun Renstra dan Renop/RKT pada setiap awal periode lima tahun dan mengajukannya kepada Rektor.
5. Tim penyusunan Renstra dan Renop Fakultas ditetapkan oleh Dekan. Wakil dekan mengusulkan Tim penyusun Renstra dan Renop pada setiap awal periode lima tahun dan mengajukannya kepada Dekan
6. Ketua Program Studi mengusulkan Tim penyusun Rencana Operasional Prodi pada setiap awal tahunan akademik dan mengajukan kepada Dekan
7. Tim penyusunan Renstra dan RKT Unit Kerja dibentuk atas permintaan Kepala Unit Kerja. Wakil Rektor mengusulkan Tim Penyusun Renstra dan RKT pada setiap awal periode lima tahun dan mengajukan kepada Rektor
8. Tim Penyusun Renstra dan Renop/RKT melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Tim Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan).
9. Kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Renstra dan Renop/RKT Universitas/Fakultas/Prodi/Unit Kerja dibiayai oleh dana Universitas.
10. Rektor/Dekan/Pimpinan Unit kerja bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan, Renstra dan Renop/RKT.

11. Wakil Rektor/Wakil Dekan/Ketua Program Studi/Wakil Badan dan Biro berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Renstra dan Renop/RKT.
12. Penyusunan Renstra dan Renop/RKT Universitas dan program pelaksanaan, Renstra dan Renop/RKT dilaporkan kepada Rektor sebelum Tahun Akademik dimulai.
13. Laporan penyusunan dan pelaksanaan Renstra dan Renop/RKT diintegrasikan dalam Sistem Informasi Universitas Nasional pada Laman Badan Penjaminan Mutu, Fakultas dan Unit Kerja masing-masing agar dapat diakses secara online dan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan.
14. Renstra dan Renop/RKT yang telah disetujui dan disahkan oleh Senat Universitas/Fakultas merupakan arah lima (5) tahun ke depan untuk jangka menengah (Renstra), dan satu (1) tahunan kedepan untuk jangka pendek (Renop/RKT)
15. Setiap kebijakan dasar Renstra, harus meliputi: 1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama, 3. Mahasiswa, 4. Sumber Daya Manusia, 5. Keuangan, sarana, dan prasarana, 6. Pendidikan, 7. Penelitian, 8. Pengabdian Masyarakat, 9. Luaran dan capaian: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, harus disusun rencana program selama lima tahun ke depan guna mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Nasional.
16. Penyusunan Program Kerja Rektor/Dekan/Ketua Program Studi/Kepala Unit Kerja didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai Universitas Nasional, serta mengacu pada Renstra dan Renop/RKT di Universitas Nasional

Selain itu, landasan penyusunan rencana operasional program studi Sarjana Ilmu Politik di Universitas Nasional didasarkan pada beberapa prinsip dan pedoman yang menjadi acuan dalam merancang kegiatan akademik dan non-akademik untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Berikut adalah landasan-landasan utama yang digunakan:

Pertama, visi, misi, dan tujuan universitas, fakultas dan program studi: Penyusunan rencana operasional harus selaras dengan visi dan misi Universitas Nasional. Program studi Sarjana Ilmu Politik perlu berkontribusi dalam mewujudkan visi universitas menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul di tingkat nasional dan internasional, serta misi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kedua, peraturan dan kebijakan pendidikan nasional: Rencana operasional disusun berdasarkan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, termasuk dalam hal standar nasional pendidikan tinggi, akreditasi, dan kurikulum. Kebijakan seperti Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) juga menjadi landasan penting dalam penyusunan rencana operasional.

Ketiga, standar akreditasi nasional dan internasional: Untuk memastikan bahwa program studi Ilmu Politik di Universitas Nasional dapat memperoleh dan mempertahankan akreditasi yang baik, rencana operasional disusun dengan mengacu pada standar akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan lembaga akreditasi internasional terkait. Standar ini mencakup aspek kurikulum, dosen, fasilitas, dan tata kelola program studi.

Keempat, hasil analisis kebutuhan dan evaluasi: Landasan lainnya adalah hasil analisis kebutuhan (needs assessment) terhadap pasar kerja dan kebutuhan masyarakat akan lulusan ilmu politik. Evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan (dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan) juga menjadi dasar dalam menyusun rencana operasional yang lebih baik.

Kelima, pengembangan Kompetensi Lulusan: Landasan penyusunan rencana operasional juga mencakup pengembangan kompetensi inti lulusan sesuai dengan profil lulusan yang diinginkan. Kompetensi ini mencakup kemampuan analisis politik, pemahaman terhadap dinamika politik nasional dan internasional, kemampuan komunikasi, serta etika profesi yang harus dimiliki oleh setiap lulusan.

Keenam, penguatan tridharma perguruan tinggi: Rencana operasional program studi juga didasarkan pada penguatan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap kegiatan dalam rencana operasional harus berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan penelitian yang relevan, dan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ketujuh, kebutuhan adaptasi terhadap perubahan global: Universitas Nasional dan program studi di dalamnya perlu adaptif terhadap perubahan global, termasuk perkembangan teknologi, isu-isu politik global, dan tuntutan pasar kerja yang dinamis. Rencana operasional harus mencakup strategi untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, serta mempersiapkan lulusan yang siap bersaing di pasar global.

Dengan landasan ini, rencana operasional yang disusun diharapkan mampu menjadi panduan strategis yang komprehensif dalam menjalankan program studi Sarjana Ilmu Politik di Universitas Nasional, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, dan mampu berkontribusi secara positif bagi bangsa dan negara.

BAB II

PROFIL PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU POLITIK

Visi	Misi	Tujuan	Strategi
Menjadi Program Studi Doktor Ilmu Politik yang fokus pada bidang politik Indonesia dan ekonomi politik yang terkemuka ditingkat nasional, dan menghasilkan ilmuan yang kritis, inovatif, kompeten, memiliki integritas moral akademik, dan ikut serta dalam pembangunan politik nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang inovatif dan berkualitas untuk mencerdaska bangsa minimum berasal dari 10 (sepuluh) provinsi di Indonesia. 2. Menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan untuk menghasilkan Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menguasai teknologi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional 3. Membangun budaya ilmiah melalui penelitian dan publikasi ilmiah yang bermutu baik di tingkat nasional dan maupun internasional. 4. Menerapkan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Politik melalui pengabdian masyarakat untuk membangun dan memberdayakan masyarakat berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. 5. Membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu akademik dan mengukuhkan eksistensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 	<p>Dengan mengacu pada visi di atas, maka Program Doktor Ilmu Politik menetapkan tujuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan Doktor Ilmu Politik yang mempunyai kompetensi tinggi yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam wawasan keahliannya untuk memecahkan masalah bangsa/negara yang kompleks, termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin serta mampu bersaing ditingkat nasional. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Pendidikan Ilmu Politik yang berkontribusi pada pemecahan berbagai persoalan kebangsaan 2. Mengintegrasikan Ilmu Politik sebagai disiplin Ilmu dengan dunia politik dalam kenyataan praktek, dalam hal ini nilai-nilai luhur politik yang dikaji dalam ilmu politik dapat dimanifestasikan dalam kehidupan bernegara sehari-hari. 3. Membangun kemitraan antara Perguruan Tinggi (PT) dengan Dunia Usaha/Lembaga Pemerintahan/civil society baik dalam dan diluar negeri untuk merefleksikan kedekatan dunia ilmu dengan realita.

	<p>Politik di tingkat nasional dan global.</p>	<p>ketrampilan teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/atau menciptakan metodologi baru untuk spesialisasi Politik Indonesia, dan Ekonomi Politik.</p> <p>3. Menghasilkan lulusan yang menguasai teori, konsep serta paradigma yang sesuai dengan keahliannya sehingga dapat bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya dan teknologi serta permasalahan yang ada di masyarakat.</p> <p>4. Menghasilkan lulusan yang mampu mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya dengan kelompok pakar sebidang maupun khalayak yang lebih luas</p>	<p>4. Membangun dunia akademik yang kondusif sebagai unsur penopang tumbuhnya minat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Mengembangkan cluster study di bidang Ilmu Politik dengan merujuk pada Peta Penelitian Universitas Nasional.</p>
--	--	---	---

BAB III

RENCANA PROGRAM TAHUNAN

Strategi	Rencana Program	PIC	Target Output	Referensi Indikator dan Renstra (IKU & IKT)	Target Capaian 2024/2025	Waktu Pelaksanaan	Anggaran (Rp 000)
1.1.1.1 Peningkatan Kerjasama dengan Instansi	A. Optimalisasi Jejaring Asosiasi Program Studi (benchmarking, penelitian dan pengabdian kolaboratif)	a.TB.Massa Djafar b.Eddy Guridno, c.Safrizal Rambe	a.1 MoU Kerjasama dengan Prodi-Prodi Ilmu Politik di Indonesia. 2 MoU dan 2 IA	IKU 2 (Kerjasama)	a.1. 2 MoU dan 1 IA dengan Prodi Ilmu Politik Akreditasi unggul di Indonesia	Oktober 2024 – Juni 2025	30.000.000
	B. Penguatan Jejaring Alumni (Reuni Alumni seluruh Angkatan)	a. TB. Massa Djafar b. Safrizal Rambe	b.1 Pengembangan Jejaring Kerjasama dengan instansi/lembaga/ organisasi dimana alumni bekerja	IKU 2 (Kerjasama)	b.1. 2 MoU dan 2 IA	November 2024-April 2025	30.000.000
		a.TB. Massa Djafar b.Safrizal Rambe	b.1 Penguatan jejaring alumni dalam wadah organisasi yang formal		b.2 Terbentuknya organisasi alumni	Mei 2025	20.000.000
1.1.1.2 Meningkatkan animo mahasiswa Baru dan rendahnya	a. Membentuk tim media sosial untuk promosi	a.TB. Massa Djafar b.Safrizal Rambe	a.1 membuat konten media sosial yang menarik sebagai sarana promosi	IKU 3 (Mahasiswa)	a.1 Membuat konten media sosial secara rutin minimal 2 konten perbulan	September 2024-September 2025	24.000.000

rasio dosen-mahasiswa							
	c. Memperbaiki tampilan website prodi dan update konten website prodi	a.Safrizal Rambe	c.1 menyajikan informasi yang komprehensif bagi calon mahasiswa baru	IKU 3 (mahasiswa)	c.1 Meningkatkan tampilan website agar lebih menarik dan menyajikan informasi komprehensif pada website	September 2024-September 2025	5.000.000
					c.2 Meningkatkan kunjungan website prodi melalui link pada media sosial dan algoritma google	September 2024-September 2025	10.000.000
1.1.1.3 Mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi pada kegiatan dan lomba nasional/ internasional	a.1 Mengikutsertakan mahasiswa dalam program International Student Mobility	a.1 Safrizal Rambe	Rekognisi nasional/internasional bagi mahasiswa	IKU 3 (mahasiswa)	Memiliki rekognisi nasional/internasional minimal 2 mahasiswa	Februari 2025-Juli 2025	30.000.000
	a.2 Mengikutsertakan mahasiswa menjadi peserta ICOSOP 4	a. Safrizal Rambe	Prestasi internasional di bidang akademik	IKU 3 (mahasiswa)	Mahasiswa memiliki prestasi akademik minimal 1 mahasiswa	Oktober 2024	5.000.000
1.1.1.4 Peningkatan jabfung dan	a.1 Mendorong dosen untuk mengurus jabatan fungsional	a. TB. Massa Djafar	90% Jabatan fungsional dosen tetap prodi pada tahun 2025	IKU 4 (Sumber Daya Manusia)	a.1 Dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala pada	September 2025	-

pendidikan dosen					2024 bisa mengurus Guru Besar pada 2025		
	a.2 Melakukan monitoring terhadap tridharma dosen	a. TB. Massa Djafar	Laporan monev untuk memastikan kinerja tridharma dosen	IKU 4 (Sumber Daya Manusia)	Seluruh dosen tetap minimal memiliki 2 output penelitian dan pengabdian pada TA 2024/2025	September 2024- Agustus 2025	-
1.1.1.5. Peningkatan lulusan tepat waktu dan kualitas lulusan	a.1 Optimalisasi Dosen Pembimbing Akademik	a. TB. Massa Djafar b. Safrizal Rambe	Seluruh dosen tetap memahami dan menjalankan fungsi sebagai pembimbing akademik	IKU 4 (Sumber Daya Manusia)	Seluruh dosen melakukan bimbingan akademik sesuai prosedur dan dilaporkan secara tertulis kepada prodi	September 2024-Agustus 2025	7.000.000
	a.2 Pengembangan kurikulum dengan penambahan mata kuliah praktek	a. TB. Massa Djafar b. Safrizal Rambe	Pengembangan dan implementasi kurikulum OBE	IKU 6 (Pendidikan)	Pembaharuan kurikulum dengan menambahkan mata kuliah praktek	September 2024-Agustus 2025	20.000.000
	a.3 Pelibatan pakar, alumni dan pengguna dalam pengembangan dan implementasi kurikulum	a. TB. Massa Djafar b. Safrizal Rambe	Implementasi kurikulum sesuai standar OBE dan lulusan dibekali keterampilan yang sesuai bidang ilmu	IKU 6 (Pendidikan)	Terdapat sekurangnya 20 sks mata kuliah praktik	September 2024	20.000.000
1.1.1.6 Peningkatan penelitian, pengabdian, dan publikasi dosen-mahasiswa	a.1 Mengadakan Penelitian dan PKM Kolaboratif Dosen-Mahasiswa	a. TB. Massa Djafar b. Safrizal Rambe	4 Laporan penelitian, 4 Laporan Pengabdian	IKU 6 (Pendidikan)	4 Laporan penelitian dan pengabdian dosen mahasiswa	Juni 2025	25.000.000

	a.2 Coaching clinic publikasi dosen mahasiswa	a. TB. Massa Djafar b. Safrizal Rambe	4 publikasi dosen-mahasiswa pada jurnal bereputasi (mahasiswa sebagai penulis pertama)	IKU 6 (Pendidikan)	2 Publikasi dosen-mahasiswa pada jurnal bereputasi dimana mahasiswa menjadi penulis pertama	Juni 2025	10.000.000
	a.3 Sosialisasi kepada mahasiswa tingkat akhir untuk melakukan sitasi tulisan dosen dan mahasiswa yang sudah publish pada jurnal	a. TB. Massa Djafar b. Safrizal Rambe	Peningkatan sitasi pada publikasi dosen-mahasiswa	IKU 6 (Pendidikan)	10 sitasi dari publikasi dosen-mahasiswa	Juni 2025	5.000.000

BAB IV

PENUTUP

A. Rangkuman

Dalam penyusunan Rencana Operasional (Renop) 2024/2025, Program Studi Sarjana Ilmu Politik telah menyusun Renop sesuai dengan kebutuhan target kinerja tahunan. Adapun secara umum, analisis TWOS berupa strategi (keunggulan) telah dituangkan dalam profil program studi pada bab II. Dimana strategi (keunggulan) ini merupakan target yang sudah tercapai dari implementasi renop tahun 2020-2024. Sedangkan pada strategi (kelemahan), dituangkan pada rencana kerja TA 2024-2025 sebagaimana terlampir pada BAB III.

Secara umum, kondisi eksisting Program Studi Sarjana Ilmu Politik saat ini mengalami beberapa hal yang menjadi sangat krusial. Pertama, menurunnya jumlah animo dan mahasiswa baru 2 tahun terakhir. Untuk hal ini, kami di Program Studi Sarjana Ilmu Politik memaksimalkan penggunaan sosial media, baik secara konten maupun eksposur. Prodi Sarjana Ilmu Politik juga turut serta dalam program marketing yang dilakukan oleh MPR Unas saat melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah. Selain itu, program PKM dosen-dosen Prodi Sarjana Ilmu Politik juga diarahkan bukan hanya untuk pemenuhan tridharma, tetapi sebagai sarana untuk promosi Prodi Sarjana Ilmu Politik.

Kedua, Prodi Sarjana Ilmu Politik belum memiliki MoU dan IA pada level internasional. Permasalahan ini diatasi bersama dibawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk membangun jejaring dan kemitraan strategis di ranah internasional. Ketiga, Prodi Sarjana Ilmu Politik belum memiliki prestasi internasional. Untuk itu, kami mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi pada konferensi internasional yang diselenggarakan oleh FISIP pada bulan Oktober 2024 dan juga mendorong mahasiswa menjadi peserta dalam kegiatan-kegiatan internasional seperti International Student Mobility yang diinisiasi FISIP dan telah berjalan selama 2 tahun terakhir

B. Saran

1. Program kerja yang telah ada dalam rancangan renop ataupun program kerja yang sifatnya insidental, sering kali terhambat karena proses administrasi internal
2. Penambahan anggaran kemahasiswaan bagi Prodi Sarjana Ilmu Politik. Hal ini dikarenakan jumlah mahasiswa aktif sangat sedikit, sedangkan mahasiswa dan himpunan mahasiswa menjadi salah satu tulang punggung bagi Prodi Sarjana Ilmu Politik untuk dapat melaksanakan program kerja
3. Perlunya rekrutment dosen secara professional untuk bisa menjadi regenerasi jabatan structural di Prodi Sarjana Ilmu Politik